

JURNAL PERENCANAAN WILAYAH

e-ISSN: 2502 – 4205

Vol.IV., No.2, Oktober 2019

<http://ojs.uho.ac.id/index.php/ppw>

ANALISIS POTENSI KETERSEDIAAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DI KABUPATEN MUNA BARAT

Laode Geo

Jurusan Agribisnis, Fakultas Pertanian Univeristas Halu Oleo

Email : geolaode55@gmail.com

ABSTRAK

Dalam rangka mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan perlu diselenggarakan pembangunan pertanian berkelanjutan, termasuk didalamnya adalah upaya perlindungan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan di Kabupaten Muna Barat. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi potensi ketersediaan lahan pangan, menganalisis potensi ketersediaan dan kebutuhan lahan pangan berkelanjutan sampai tahun 2045 di Kabupaten Muna Barat. Penelitian dilakukan di Kabupaten Muna Barat, Provinsi Sulawesi Tenggara pada Tahun 2016-2017. Luas wilayah Kabupaten Muna Barat sekitar 2.057,69 Km². Penelitian dilakukan dalam 4 (lempat) tahap yaitu (1) Persiapan penelitian, (2) Penyiapan bahan, peralatan dan peta kerja, (3) Survei lapangan dan (4) Analisis data meliputi analisis spasial dan non spasial. Analisis data spasial yaitu data yang bersifat keruangan dari hasil lapangan identifikasi lapangan yang selanjutnya dianalisis dalam bentuk spasial atau pemetaan dengan menggunakan software remote sensing dan SIG. Sedangkan analisis data non spasial dilakukan terhadap data-data hasil lapangan yang berkaitan dengan karakteristik lahan pangan, kepemilikan, produksi, pendapatan, biaya dan pemasaran, pendugaan kebutuhan lahan pangan, proyeksi permintaan bahan pangan dan rencana pengelolaan lahan pangan berkelanjutan. Luas lahan pangan sawah di Kabupaten Muna adalah 2.343,35 Ha terdiri dari lahan eksisting 2.031,35 Ha dan lahan potensial 312,10 Ha. Kebutuhan lahan pangan di Kabupaten Muna Barat sampai tahun 2017 adalah 3.148 Ha sehingga terdapat defisit lahan 805 Ha. Sedangkan kebutuhan lahan sampai tahun 2045 adalah 4.864 Ha sehingga terdapat defisit lahan sekitar 2.521 Ha.

Kata Kunci : Ketersediaan, Lahan Pangan, Kabupaten Muna Barat

Doi: [dx.doi.org/10.33772/ppw](https://doi.org/10.33772/ppw)

1. PENDAHULUAN

Dalam upaya membangun ketahanan dan kedaulatan pangan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat adalah hal yang sangat penting untuk direalisasikan. Dalam rangka mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan perlu diselenggarakan pembangunan pertanian berkelanjutan, termasuk

didalamnya adalah upaya perlindungan lahan pertanian pangan.

Lahan pertanian memiliki peran dan fungsi strategis bagi masyarakat Indonesia yang bercorak agraris karena terdapat sejumlah besar penduduk Indonesia yang menggantungkan hidup pada sector pertanian. Dalam demikian, lahan tidak saja memiliki nilai ekonomis,

tetapi juga social, bahkan memiliki nilai religious. Dalam rangka pembangunan pertanian yang berkelanjutan, lahan merupakan sumberdaya pokok dalam usaha pertanian, terutama pada kondisi yang sebagian besar bidang usahanya masih bergantung pada pola pertanian berbasis lahan. Lahan merupakan sumber daya alam yang bersifat langka karena jumlahnya tidak bertambah, tetapi kebutuhan terhadap lahan selalu meningkat.

Sementara meningkatnya pertambahan penduduk serta perkembangan ekonomi dan industri mengakibatkan permintaan akan lahan semakin meningkat sehingga berpeluang menyebabkan degradasi, alih fungsi dan fragmentasi lahan pertanian pangan telah mengancam daya dukung wilayah secara nasional dalam menjaga kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan.

Berdasarkan data statistik tahun 2016 jumlah penduduk di Kabupaten Muna Barat sebesar 77.084 jiwa, terdiri dari 37.462 jiwa laki-laki dan 39.622 jiwa perempuan dengan tingkat kepadatan yaitu 85 jiwa/Km serta rasio jenis kelamin yaitu 95. Jumlah penduduk di Kabupaten Muna Barat sebagian besar menyebar secara merata. Peningkatan jumlah penduduk ini juga relative lebih besar dibandingkan dengan pertambahan lahan pangan (sawah), sehingga ada potensi dalam jangka panjang untuk terjadinya rawan pangan, apabila tidak dilakukan lebih besar dibandingkan dengan pertambahan lahan pangan (sawah), sehingga ada potensi dalam jangka panjang untuk

terjadinya rawaan pangan, apabila tidak dilakukan upaya perlindungan dan peningkatan terhadap ketersediaan lahan pertanian pangan di Kabupaten Muna.

Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi potensi ketersediaan lahan pangan dan memetakan potensi ketersediaan lahan pangan berkelanjutan di Kabupaten Muna Barat.

2. BAHAN DAN METODE

2.1. Waktu dan Tempat

Penelitian dilakukan di Kabupaten Muna Barat, Provinsi Sulawesi Tenggara pada Tahun 2016-2017. Secara geografis Kabupaten Muna memiliki total luas sekitar 906,28 Km².

2.2. Alat dan Bahan

Bahan-bahan penelitian yang digunakan adalah peta interpretasi image google earth dengan SAS planet tahun 2016, DEM citra SRTM resolusi 90 m, peta administrasi Kabupaten Muna tahun 2014 dan peta rupa bumi Indonesia skala 1 : 50.000 tahun 1999, data jumlah penduduk terakhir dan data alih fungsi lahan sawah.

2.3. Tahapan Penelitian

Penelitian dilakukan dalam 4 (lempat) tahap yaitu (1) Persiapan penelitian, (2) Penyiapan bahan, peralatan dan peta kerja, (3) Survei lapangan dan (4) Analisis data meliputi analisis spasial dan non spasial. Analisis data spasial yaitu data yang bersifat keruangan dari

hasil lapangan identifikasi lapangan yang selanjutnya dianalisis dalam bentuk spasial atau pemetaan dengan menggunakan software remote sensing dan SIG. Sedang analisis data non spasial dilakukan terhadap data-data hasil lapangan yang berkaitan dengan karakteristik lahan pangan, kepemilikan, produksi, pendapatan, biaya dan pemasaran, pendugaan kebutuhan lahan pangan, proyeksi permintaan bahan pangan dan rencana pengelolaan lahan pangan berkelanjutan.

2.4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan yaitu analisis spasial dan non spasial. Analisis data spasial yaitu data yang bersifat keruangan dari hasil lapangan identifikasi lapangan yang selanjutnya dianalisis dalam bentuk spasial atau pemetaan dengan menggunakan software remote sensing dan SIG. Sedang analisis data

non spasial dilakukan terhadap data-data hasil lapangan yang berkaitan dengan karakteristik lahan pangan, kepemilikan, produksi, pendapatan, biaya dan pemasaran, pendugaan kebutuhan lahan pangan, proyeksi permintaan bahan pangan dan rencana pengelolaan lahan pangan berkelanjutan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Luas Lahan Pertanian

Pangan di Kabupaten Muna Barat

Luas lahan pertanian pangan dirinci pada setiap kecamatan di Kabupaten Muna Barat. Lahan pangan yang dipetakan terdiri dari lahan basah/sawah dan lahan kering/ladang. Lahan pangan basah/sawah digunakan untuk pengembangan komoditi padi sawah. Sedangkan lahan kering/ladang diusahakan untuk pengembangan tanaman palawija.

Tabel 1. Luas Lahan Pertanian Pangan di Kabupaten Muna Barat

No	Kecamatan	Sawah (Ha)	Ladang (Ha)	Luas	
				Ha	%
1.	Barangka	0	249.75	249.75	3.39
2.	Kusambi	0	243.68	243.68	3.30
3.	Lawa	0	669.18	669.18	9.07
4.	Maginti	227.90	427.05	654.95	8.88
5.	Napano Kusambi	0	649.29	649.29	8.80
6.	Sawerigadi	294.25	1095.69	1389.95	18.84
7.	Tiworo Kepulauan	407.92	592.49	1000.41	13.56
8.	Tiworo Selatan	341.25	509.71	850.96	11.53
9.	Tiworo Tengah	0	546.94	546.94	7.41
10.	Wadaga	292.41	830.12	1122.53	15.22
Jumlah		1563.74	5813.90	7377.64	100.00

3.2. Kebutuhan Lahan Pangan di Kabupaten Muna Barat

Kebutuhan lahan di Kabupaten Muna Barat diproyeksikan

berdasarkan jumlah penduduk dan kebutuhan konsumsi beras.

Berdasarkan pertimbangan tersebut dapat diasumsikan jumlah lahan yang

harus tersedia untuk memenuhi produksi beras di Kabupaten Muna Barat. Asumsi kebutuhan lahan kemudian diperbandingkan dengan ketersediaan lahan tanaman pangan (lahan basah/sawah). Jika kebutuhan lahan di suatu wilayah lebih tinggi dibanding ketersediaan lahan basah/sawah maka wilayah tertentu dikatakan mengalami defisit lahan sehingga kebutuhan pangannya harus

diperoleh dari luar atau daerah lain yang memiliki produksi beras lebih tinggi. Selain itu, bila suatu wilayah memiliki ketersediaan lahan pangan (basah/sawah) lebih tinggi dibanding perhitungan kebutuhan lahan maka wilayah tersebut dikatakan surplus lahan sehingga kebutuhan pangannya dapat memenuhi kebutuhan penduduk bahkan mampu menyuplai keluar atau ke daerah lain.

Tabel 2. Analisis Kebutuhan Lahan Pangan di Kabupaten Muna Barat

No.	Desa/ Kelurahan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kebutuhan Pangan (Ton)*	Ketersediaan Lahan Pangan (Ha)	Kebutuhan Lahan Pangan (Ha)	Selisih (Ha)
1.	Barangka	6.460	808	0	273	-273
2.	Kusambi	11543	1443	0	487	-487
3.	Lawa	7995	999	0	338	-338
4.	Maginti	8836	1105	292.8	373	-80
5.	Napanokusambi	2507	313	0	106	-106
6.	Sawerigadi	6755	844	379.41	285	94
7.	Tiworo Kepulauan	6899	862	407.93	291	117
8.	Tiworo Selatan	5195	649	422.64	219	203
9.	Tiworo Tengah	6997	875	235.72	295	-60
10.	Tiworo Utara	5220	653	0	220	-220
11.	Wadaga	6146	768	604.51	260	345
Jumlah		74.553	9.319	2.343,01	3.147	-805

3.3. Potensi Ketersediaan Lahan Pangan di Kabupaten Muna Barat

Potensi produksi lahan basah/sawah di Kabupaten Muna Barat dinilai pada kondisi eksisting dan potensi lahan basah. Lahan

eksisting merupakan lahan sawah yang memproduksi secara konsisten sepanjang tahun sementara potensi lahan basah merupakan lahan yang memproduksi tidak sepanjang tahun (sawah tadah hujan) atau lahan basah.

Tabel 3. Potensi Ketersediaan Lahan Pangan di Kabupaten Muna Barat

No.	Kecamatan	Luas Lahan Sawah (BPS, 2016)			Luas Lahan Sawah (Hasil Pengukuran, 2016)		
		Diusahakan (Ha)	Tidak Diusahakan (Ha)	Total (Ha)	Potensi Eksisting (Ha)	Lahan Basah (ha)	Total (Ha)
1.	Barangka	0	0	0	0	0	0
2.	Kusambi	0	0	0	0	0	0
3.	Lawa	0	0	0	0	0	0
4.	Maginti	395	50	445	292.8	0	292.8
5.	Napano Kusambi	0	0	0	0	0	0
6.	Sawerigadi	226	617	843	379.41	0	379.41
7.	Tiworo Kepulauan	665	800	1465	407.92	0	407.92
8.	Tiworo Selatan	733	564	1297	422.64	0	422.64
9.	Tiworo Tengah	40	287	327	236.17	0	236.17
10.	Tiworo Utara	0	0	0	0	0	0
11.	Wadaga	0	0	0	292.41	312.1	604.51
Jumlah		2.059	2.318	4.377	2.031,35	312,1	2.343,45

Luas lahan sawah eksisting di Kabupaten Muna Barat adalah 2.031,35 Ha. Lahan tersebut merupakan lahan sawah yang dikelola sepanjang tahun secara konsisten. Sementara lahan sawah potensial/lahan basah yang tidak selalu diusahakan sepanjang tahun terdapat di Kecamatan Wadaga seluas 312,10 Ha. Lahan ini merupakan lahan sawah yang pernah diusahakan dan lahan basah yang potensial menjadi lahan sawah. Jumlah keseluruhan lahan basah/sawah di Kabupaten Muna dapat mencapai 2.343,45 Ha. Luas lahan sawah eksisting tertinggi terdapat di Kecamatan Tiworo Selatan seluas 422,64 Ha. Kendala utama pengelolaan lahan padi sawah di Kabupaten Muna Barat adalah ketersediaan air yang sangat rendah akibat minimnya fasilitas irigasi yang tersedia di seluruh wilayah persawahan sehingga sebagian besar masyarakat mengalami kesulitan dalam meningkatkan produksi padi sawah.

3.4. Prediksi Situasi Lahan Pangan Di Kabupaten Muna Barat

Kebutuhan lahan pangan dan kebutuhan konsumsi penduduk diproyeksikan tahun 2016 dan tahun 2045. Penilaian ini dimaksudkan untuk mengetahui kebutuhan konsumsi penduduk dan luas lahan pangan yang harus tersedia untuk meningkatkan produksi tanaman pangan. Penilaian tersebut dilakukan dengan membandingkan kebutuhan konsumsi penduduk dan luas lahan pangan yang harus tersedia saat ini dan yang akan datang. Asumsi yang digunakan bahwa laju pertumbuhan penduduk terus meningkat sehingga kebutuhan konsumsi pangan juga akan mengalami peningkatan sehingga perlu ada perlindungan lahan pangan saat ini untuk menjamin pasokan pangan tetap aman sampai tahun 2045. Proyeksi kebutuhan lahan pangan dan kebutuhan konsumsi penduduk di Kabupaten Muna Barat adalah sebagai berikut.

Tabel 4. Analisis Situasi Kebutuhan Lahan Pangan Tahun 2016 di Kabupaten Muna Barat

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kebutuhan Pangan (Ton)	Ketersediaan Lahan Pangan (Ha)	Kebutuhan Lahan Pangan (Ha)	Selisih (Ha)
1.	Barangka	6460	808	0	273	-273
2.	Kusambi	11543	1443	0	487	-487
3.	Lawa	7995	999	0	338	-338
4.	Maginti	8836	1105	293	373	-80
5.	Napanokusambi	2507	313	0	106	-106
6.	Sawerigadi	6755	844	379	285	94
7.	Tiworo Kepulauan	6899	862	408	291	117
8.	Tiworo Selatan	5195	649	423	219	203

9.	Tiworo Tengah	6997	875	236	295	-60
10.	Tiworo Utara	5220	653	0	220	-220
11.	Wadaga	6146	768	605	260	345
Jumlah		74553	9319	2343	3148	-805

Kebutuhan lahan pangan merupakan perhitungan kebutuhan lahan untuk mengoptimalkan produksi pangan bagi pemenuhan kebutuhan pangan penduduk di Kabupaten Muna Barat. Jumlah penduduk di Kabupaten Muna Barat adalah 74.553 jiwa sementara kebutuhan konsumsi penduduk mencapai 125 kg pangan/kapita/tahun sehingga kebutuhan pangan yang harus tersedia untuk memenuhi kebutuhan penduduk tersebut adalah

9.319 Ton. Berdasarkan kebutuhan pangan yang harus tersedia maka kebutuhan lahan yang harus tersedia di wilayah Kabupaten Muna Barat untuk memenuhi produksi pangan sekitar 3.148 Ha. Berdasarkan hasil observasi dan pengukuran di lapangan menunjukkan ketersediaan lahan sawah dan potensi lahan basah yang dapat disawahkan di Kabupaten Muna Barat sekitar 2.343 Ha. Hal ini berarti masih terdapat defisit lahan sekitar -805 Ha.

Tabel 5. Analisis Situasi Kebutuhan Lahan Pangan Tahun 2045 di Kabupaten Muna Barat

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kebutuhan Pangan (Ton)	Ketersediaan Lahan Pangan (Ha)	Kebutuhan Lahan Pangan (Ha)	Selisih (Ha)
1.	Barangka	10171	1271	0	430	-430
2.	Kusambi	16955	2119	0	716	-716
3.	Lawa	12585	1573	0	531	-531
4.	Maginti	12518	1565	293	529	-236
5.	Napanokusambi	7131	891	0	301	-301
6.	Sawerigadi	10331	1291	379	436	-57
7.	Tiworo Kepulauan	10366	1296	408	438	-30
8.	Tiworo Selatan	7896	987	423	333	89
9.	Tiworo Tengah	10408	1301	236	440	-204
10.	Tiworo Utara	7341	918	0	310	-310
11.	Wadaga	9473	1184	605	400	204
Jumlah		115.175	14.397	2.343	4.864	-2.521

Kebutuhan lahan pangan merupakan perhitungan kebutuhan lahan untuk mengoptimalkan produksi pangan bagi pemenuhan kebutuhan pangan penduduk di

Kabupaten Muna Barat. Jumlah penduduk di Kabupaten Muna Barat yang diproyeksikan pada tahun 2045 akan meningkat menjadi adalah 115.175 jiwa sementara kebutuhan

konsumsi penduduk mencapai 125 kg pangan/kapita/tahun sehingga kebutuhan pangan yang harus tersedia untuk memenuhi kebutuhan penduduk tersebut menjadi 14.397 Ton. Berdasarkan kebutuhan pangan yang harus tersedia maka kebutuhan lahan yang harus tersedia di wilayah Kabupaten Muna Barat pada tahun 2045 untuk memenuhi produksi pangan sekitar 4.864 Ha. Berdasarkan hasil observasi dan pengukuran di lapangan menunjukkan ketersediaan lahan sawah dan potensi lahan basah yang dapat disawahkan di Kabupaten Muna Barat sekitar 2.343 Ha. Hal ini berarti masih terdapat defisit lahan sekitar -2.521 Ha.

4. KESIMPULAN

1. Luas lahan pangan sawah di Kabupaten Muna adalah 2.343,35 Ha terdiri dari lahan eksisting 2.031,35 Ha dan lahan potensial 312,10 Ha.
2. Kebutuhan lahan pangan di Kabupaten Muna Barat sampai tahun 2017 adalah 3.148 Ha sehingga terdapat defisit lahan 805 Ha. Sedangkan kebutuhan lahan sampai tahun 2045 adalah 4.864 Ha sehingga terdapat defisit lahan sekitar 2.521 Ha.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, S. 2000. Konservasi Tanah dan Air. IPB. Bogor
- Bintarto, R. 1984. Interaksi Desa Kota dan Permasalahannya. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- FAO, 1976. Sustainable Agriculture Production : Implication For International Agriculture Reaseach. Dalam FAO Research and Technology Paper 4. Rome. Italy.
- Haeruman, H. 2000. Keterpaduan Pengembangan Wilayah Integrasi Program Pengembangan Kawasan Sentra Produksi, Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu, Kawasan Tertinggal. Lokakarya Mencari Format Baru Pengembangan KTI dalam Era Otonomi Daerah. Jakarta : 23-24 November 2000.
- Jayadinata, JT. 2008. Tata Guna Tanah dalam Perencanaan Pedesaan, Perkotaan dan Wilayah Edisi Ketiga. ITB. Bandung.
- Jhingan, 1994. Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan. PT. Grafindo Persada. Jakarta.
- Nurisyah, 1997. Manfaat dan Perencanaan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan. Makalah Lokakarya Upaya Pengembangan dan Pembinaan Ruang Terbuka Hijau Perkotaan di Masa Datang. Jakarta.
- Rustiadi, E. 2004. Perencanaan Pengembangan Wilayah (Konsep Dasar dan Teori). IPB. Bogor.
- Rustiadi. E dan Wafda, R. 2008. Masalah Ketersediaan Lahan dan Konversi Lahan Pertanian. PSP3 LPM. IPB.
- Sadikin, 2009. Analisis Dampak Konversi Lahan Pertanian Terhadap Produksi Padi dan Land Rent. IPB. Bogor.
- Sandy, I. M. 1977. Tanah Kritis Sehubungan dengan Usaha Pertanian. Publikasi No. 48 Cetakan Ke-2 Jakarta.
- Sihalolo, M. 2004. Konversi Lahan Pertanian dan Perubahan

- Struktur Agraria di
Kelurahan Mulyoharjo
Kecamatan Bogor Selatan.
IPB. Bogor.
- Sumaryanto, N. 2001. Analisis
Kebijakan Konversi Lahan
Sawah ke Penggunaan Non
Pertanian. Pusat Penelitian
Sosial Ekonomi Pertanian
dan Proyek Pembinaan
Kelembagaan Penelitian
Pertanian Nasional. Bogor.
- Subagyo, H., Djaenudin D., Adi A.
2000. Perubahan Tata Guna
Lahan dalam Kaitannya
dengan Ketahanan Pangan.
Seminar Hasil Penelitian
dan Pengkajian Teknologi
Pertanian. Palangkaraya.
Kalsel.
- Simond, J. O. 1988. Landscape
Architecture. Mc. Graw Hill
book Co. New York.
- Sutanto, R. 1986. Pengindraan Jauh
Jilid II. Gadjah Mada
University Press.
Yogyakarta.
- Wahyono, T. 2011. Kajian Akademik
Potensi Ruang Terbuka
Hijau dalam Penurunan Gas
Emisi di Jakarta. BLH.
Jakarta.
- Yunus, H. S. 2010. Struktur Tata
Ruang Kota. Pustaka Pelajar.
Yogyakarta.

